

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI BENIH DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI DI KECAMATAN TORUE KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Elis

elisrerung@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims to describe how the implementation of Seeds Subsidy Grant Program in Increasing of Paddy Productivity in Torue Sub-district, Parigi Moutong Regency. The research employs descriptive qualitative method with data collection covering observation. There are 6 informants as the sample who selected through purposive sampling. The research result indicates that the implementation of seeds Subsidy Grant Program in increasing of Paddy Productivity in Torue Sub-district, Parigi Moutong Regency with model evaluation approach by Bardach namely efficiency and effectiveness of policy not optimal yet. There are some factors influencing, such as: 1). From technical feasibility, the lateness in distributing and seeds volume given in not appropriate 2). From economy factor it has increased productivity but still not significant felt by farmers, 3). From political aspect, have not been implemented optimally from the aspect of socialization and coaching, and supervision, 4). From administration operation, the operators of program have got commitment and ability organizationally

Keywords : *evaluation, technical feasibility, economy, politic, administration Politic and seeds subsidy grand program*

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Di sisi lain masih banyak persoalan mendasar yang harus diatasi seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya akses petani terhadap permodalan serta belum optimalnya sistem perbenihan nasional.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian melalui intensifikasi untuk peningkatan produktivitas di masa mendatang semakin penting dan harus lebih ditingkatkan dalam upaya peningkatan produksi secara terus menerus untuk mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.

Kasus rawan pangan dan gizi buruk terjadi di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan dalam menopang ketersediaan pangan dalam bentuk program ketahanan pangan nasional dalam mendukung peningkatan 10 juta ton beras ditahun 2014, melalui kebijakan pemberian bantuan subsidi benih kepada kelompok tani dalam rangka peningkatan produktivitas pangan. Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan program swasembada beras.

Olehnya Pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Parigi Moutong, mengimplementasikan kebijakan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 4340/Kpts/SR.120/6/2013 tentang penetapan subsidi benih untuk komoditas padi, jagung dan kedelai berupa program pemberian bantuan subsidi benih padi kepada petani, dengan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan petani pada setiap Kecamatan dalam bentuk Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di Kabupaten Parigi Moutong. Adapun jumlah kelompok Tani yang terdapat di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi fokus penelitian saat ini terdiri dari 8 kelompok Tani yang masing-masing kelompok terdiri dari satu ketua dan 20-25 orang sebagai anggota kelompok tani.

Bantuan subsidi benih adalah sejumlah benih varietas unggul bermutu, yang diberikan kepada petani dengan cara petani membeli benih dengan harga terjangkau yakni petani hanya membayar 25% dari harga benih mengingat harga benih ditingkat petani mahal olehnya petani didalam penggunaan benih hanya menggunakan benih secara asal-asalan sehingga di dalam pencapaian produksi tidak sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah, melalui Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai instansi yang membidangi tanaman pangan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul yaitu "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.", dan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu: " Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan indikator kelayakan teknis, peluang ekonomi dan financial, daya dukung politis serta daya dukung administrative ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dimensi Kelayakan Teknis (*Technical Fiability*), peluang

ekonomi dan finansial (*Economy and Financial Possibility*), daya dukung politis (*Political Viability*) dan daya dukung administratif (*Administrative Viability*) dalam evaluasi pelaksanaan program pemberian subsidi benih dalam peningkatan produktivitas di Kecamatan Torue . Sedangkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi dalam beberapa hal sebagai berikut : Secara akademik, diharapkan hasil penelitian ini, dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya tentang evaluasi kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, dan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam hal melihat evaluasi Implementasi Kebijakan Program Subsidi Benih dalam peningkatan Produktivitas di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu dari tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting, karena proses ini akan melibatkan bukan hanya para evaluator dari kalangan akademisi maupun praktisi, namun melibatkan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta kondisi dimana tidak ada jarak antara kebijakan publik dengan masyarakat.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target

kebijakan publik yang ditentukan (Muhajir, 1996 ; 102).

Menurut Winarno (2008: 225) bila kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992 ; 96) mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan”.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006 ; 15) “Evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.

Model evaluasi kebijakan Bardach, dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S. 1986 (156-167), diungkapkan ada 4 aspek pokok dalam mengevaluasi kebijakan, yaitu :

1. Technical Feasibility

Measure whether policy or program outcomes achieve their purpose. The two principal criteria that fall under this category are effectiveness and adequacy.

Feasibilitas teknis yang meliputi prosedur yang harus dipenuhi dari suatu program yang dievaluasi. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni *efektivitas program* yaitu kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan *adequacy* yakni kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumberdaya didalam program tersebut.

2. Economy and financial possibility;

Measure, first what the program cost, and second, what the produce of benefits. Three concept are prominent to discussion of economic evaluation criteria: tangible versus intangible; monetarizable versus non-monetarizable criteria and direct versus indirect cost-benefit, criteria viability.

Peluang ekonomi dan finansial dari kebijakan/program. Pengukurannya mencakup: Pertama: biaya program yang diperlukan untuk melaksanakannya dan; Kedua: keuntungan yang dihasilkan dari program yang dilaksanakan. Ukuran untuk ini menyangkut *tangible and intangible; monetarizable versus non monetarizable* dan *direct versus indirect cost benefit*.

3. Political viability

Policy is developed in political arena and must survive the political test. Consequently, alternatives must be subjected to political assessment. Political criteria then, deal with the acceptability of alternatives to decision makers, public official, influential citizens and groups and other sources of power. Law, rules and regulations that specify bound on

acceptable alternatives result from the political process. Political criteria that should be considered in virtually every analysis include acceptability, appropriateness, responsiveness, legality and equity.

Daya dukung politik yakni dukungan politik yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi. Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, alternatif kebijakan selayaknya berfokus pada aspek aspek yang mengandung nilai-nilai/penilaian politik. Ukurannya dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*), para pejabat publik, masyarakat dan lain lain sumber kekuasaan dalam proses politik. Secara spesifik hukum, perundangan dan aturan-aturan merupakan perwujudan daripadanya. Dengan demikian ukuran yang dimaksudkan menyangkut dukungan para penentu kebijakan yang memungkinkan dampak yang ditimbulkan atau kegunaan dari program-program kebijakan yang dihasilkan benar-benar berguna atau bernilai.

4. Administrative operability

Measure how possible it is to actually implement the proposed policy or programs within the political, social and most important, administration context. Specific criteria to consider in evaluating administrative operability include authority, institutional commitment, capability and organizational support.

Mengukur seberapa besar kemungkinan penerapan secara nyata dari kebijakan atau program yang diusulkan dalam konteks politik, sosial dan yang terpenting adalah permasalahan administrasi yang meliputi wewenang, komitmen kelembagaan, kapabilitas dan dukungan organisasional yang menyangkut fasilitas fisik dan lain lain dukungan (*support services*).

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi untuk mengadakan perubahan, menetapkan prioritas program maupun melakukan *require cooperation* dengan institusi lain, merupakan kunci bagi keberhasilan dalam mengimplementasikan program program suatu kebijakan. Kondisi ini menuntut adanya otoritas yang cukup besar dari sebuah institusi yang memungkinnnya untuk dapat melaksanakan perubahan-perubahan maupun pemilihan alternatif tindakan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tuntutan yang diharapkan.

Bantuan Subsidi Benih

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No.3/HK.310/C/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Subsidi Benih, merupakan petunjuk dalam rangka pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan secara nasional, pemerintah telah memprogramkan penyediaan benih bersubsidi yang penjualan dan penyalurannya ditugaskan kepada produsen pelaksana PSO subsidi benih. Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong dalam menyusun jadwal penyaluran benih secara rinci sesuai dengan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang meliputi jadwal tanam dilokasi sasaran. Penyaluran bantuan subsidi benih dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan prosedur penetapan kelompok tani pembeli benih bersubsidi yakni kelompok tani pelaksana Sekolah Lapangan – Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan diluar SL-PTT dengan mengacu kepada prosedur penetapan kelompok tani pembeli benih bersubsidi. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan adalah varietas, volume benih, dan masa berlaku label serta pola penyaluran bantuan benih bersubsidi kepada kelompok tani diupayakan dapat dilaksanakan, sesuai dengan prosedur penetapan petani/kelompok tani pembeli benih bersubsidi.

Kelompok tani penerima bantuan subsidi benih adalah kelompok tani penerima bantuan SL-PTT dan di luar SL-PTT padi inbrida, jagung dan Kedelai pada tahun 2014, diutamakan kelompok yang tidak mendapatkan benih dari sumber pendanaan lainnya dari pemerintah (pusat, provinsi, atau kabupaten) menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama, dan Kelompok tani tersebut bersedia menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.

Adapun kriteria pemberian benih yang didistribusikan kepada kelompok tani adalah benih yang bersertifikat dengan spesifikasi teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Benih yang disalurkan belum kadaluarsa, dimana masa berlaku label paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya kadaluarsa dengan daya tumbuh minimal 80%, kadar air maksimal 13% kotoran benih 2% serta campuran varietas lain 0,5%. Kendala yang dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan antara lain masih relatif rendahnya produktivitas tanaman.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya pertanian padi serta mengantisipasi kondisi iklim ekstrim yang dapat mengganggu produksi pangan, perlu dilakukan upaya khusus melalui bantuan benih bersubsidi. Kendala yang dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan antara lain masih relatif rendahnya produktivitas tanaman oleh karena sebagian petani belum menggunakan benih bermutu varietas unggul dalam budidayanya dikarenakan harga benih mahal ditingkat petani

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Silalahi (2009 ; 28) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang suatu situasi, setting sosial,

atau hubungan. Menurut Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suandi (2008 : 1) *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Prastowo (2012;22) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive dalam Penentuan Informan, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pertimbangan yang dimaksud yaitu informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam Program bantuan subsidi benih Dalam Peningkatan Produktivitas Padi Di Kecamatan Torue, dan dianggap mengetahui permasalahan yang dihadapi yang dapat memberikan informasi secara lengkap. Adapun yang menjadi informan sebanyak 5 orang, yaitu : Kepala Bidang Tanaman Pangan , 1 orang KAUPPT Torue, 1 orang , Ketua Kelompok Tani, 1 orang, Anggota Kelompok, 2 orang.

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada 2 macam yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:13-14) data menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua kuantitatif dan kualitatif, di mana data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Nasution (1996 : 142),

bahwa analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Torue merupakan pemekaran wilayah dari kecamatan Torue yang definitif pada tahun 2006. Berbeda dengan wilayah kecamatan induk, topografi wilayah kecamatan torue rata - rata berupa dataran rendah, hanya berapa desa yang berbukit-bukit, antara lain desa Astina dan Tolai Barat. Ketinggian rata-rata wilayah disetiap desa paling tinggi 24 meter diatas permukaan air laut. Berdasarkan letak geograf, wilayah kecamatan torue dibatasi oleh teluk tomini di sebelah utara, kecamatan Balinggi dan Teluk tomini di sebelah timur, kabupaten Sigi disebelah selatan serta kecamatan Parigi Selatan di sebelah barat.

Secara administratif Kecamatan Torue terbagi menjadi 7 desa definitif dengan luas wilayah mencapai 275,84 km². Desa Tolai Barat merupakan wilayah paling luas, mencai 77,80 km². selajutnya adalah Desa Tolai (66,01 km²) dan Desa Astina (41,48 km²). Sedangkan luas terkecil adalah Desa Purwosari (5,47 km²).

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama : *Technical Feasibility (Kelayakan Teknis)*, *Economy and financial possibility (Faktor Ekonomi)*, *Political viability (Faktor Politik)* dan *Administrative operability (Dukungan*

Administrasi), seperti yang dikemukakan oleh Bardach (dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986: 156 – 167)

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dengan melihat 4 dimensi evaluasi kebijakan diatas, dengan melakukan wawancara melibatkan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah – masalah yang diteliti.

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, sudah memiliki kelayakan teknis yang jelas sesuai dengan pendapat Bardach (dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986: 156 – 167) , dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Saiful sebagai Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Parigi Moutong, yang merupakan Bidang yang melaksanakan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih, mengemukakan bahwa :

“ Bantuan subsidi benih belum berjalan dengan efektif, karena benih tidak semuanya siap tepat pada waktunya, walaupun Kecamatan Torue yang mendapatkan subsidi benih lebih awal disebabkan dari segi kesiapan berkas usulan. ” (Wawancara,5 Februari 2015)⁴.

Hasil wawancara tersebut, membuktikan bahwa Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih belum berjalan dengan efektif, karena masih memiliki kendala, antara lain benih tidak tersedia tepat pada waktunya, dimana Kecamatan Torue bisa dapat lebih awal karena kesiapan berkas usulan permintaan subsidi benih.

Mengenai kecukupan benih yang diprogramkan, Saiful mengungkapkan bahwa: *“ Untuk Kec. Torue kalau tahun 2013 tersalurkan 1.105,22 ha, sedangkan tahun 2014 ini terjadi penurunan hanya sekitar 670,05 ha, hal ini karena benih tidak tersedia ketika petani mau menanam sehingga petani*

tidak mendapatkan benih tersebut. Jenis benih yang mau disalurkan tidak tersedia di daerah Parigi Moutong “ (Wawancara,5 Februari 2015)

Hal ini membuktikan bahwa Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih belum mencukupi harapan para petani, karena bibit yang dibantukan masih sangat minim jika dibandingkan dengan luas persawahan yang ada di Kecamatan Torue. Benih yang disubsidi juga tidak tersedia di Kawasan Parigi Moutong. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, sudah memiliki dukungan dari faktor ekonomi yang esuai dengan pendapat Bardach (dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986: 156 – 167), dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama I Wayan Muliarsa, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian dan Perternakan Kecamatan Torue, mengungkapkan bahwa:

“ Kalau produksi untuk tahun ini turun karena terjadinya pergantian varietas dan dukungan sarana prasarana untuk menambah hasil dari pemerintah masih kurang, apalagi petani sekarang sudah menggunakan combine harvester.” (Wawancara, 8 Februari 2015).

Informasi ini menunjukkan bahwa Program Pemberian Subsidi Benih di Kecamatan Torue tidak meningkatkan produktifitas hasil pertanian, karena bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Tani oleh Pemerintah masih kurang. Hal ini juga disebabkan oleh benih yang disediakan oleh Pemerintah merek Combine Harvester.

Mengenai perbandingan hasil dengan bantuan subsidi benih, I Wayan Muliarsa mengungkapkan bahwa :

“ dengan kurangnya bantuan Subsidi benih dan jenih benih subsidi yang diberikan juga tidak begitu baik untuk persawahan di Kec. Torue, akhirnya hasil yang kami terima masih

belum meningkat seperti yang diharapkan ” (Wawancara,8 Februari2015)

Hal ini membuktikan bahwa Bantuan Subsidi Benih belum mengalami peningkatan hasil pertanian, walaupun sudah dibantu dalam bentuk Program Subsidi Benih, yang dipengaruhi oleh jenis benih dan masih kurangnya benih yang diberikan kepada Kelompok Tani. Benih yang diberikan juga tidak baik untuk persawahan di Kecamatan Torue.

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, sudah memiliki dukungan dari faktor politik yang sesuai dengan pendapat Bardach (dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986: 156 – 167), dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan dari Ketua Kelompok Tani di Kec. Torue yang bernama Putu Suriyanto menyebutkan bahwa :

“ sejauh ini kami melihat ditingkat unit pelaksana teknis tetap melaksanakan sosialisasi kepada kelompok tani meskipun penyampaiannya melalui penyuluh maupun kepala UPTD , dengan demikian kami mengetahui ada program subsidi benih, meskipun dilapangan bantuan subsidi benih yang diterima tidak semua mendapatkannya, ditambah lagi jika benih tidak ada pada saat kami butuhkan untuk menanam, sehingga kami harus menunggu dan kalau kami menunggu lama maka kami akan takut adanya serangan hama jadi kami putuskan untuk tidak membeli benih dari Program Subsidi ini, dari pada kami rugi karena menunggu benih jadi kami gunakan benih yang ada pada kami dari sisa panen yang lama.” (Wawancara, 23 Januari 2015).

Dari wawancara tersebut bersama Ketua Kelompok Tani, peneliti melihat kurangnya sosialisasi terkait program subsidi. Sosialisasi sangat diperlukan agar semua kelompok tani mengetahui Program tersebut, mengingggat program ini sangat membantu petani dalam

penyediaan benih bermutu dengan harga terjangkau.

Pendapat informan lainnya diberikan yang bernama Wiwin, salah seorang anggota kelompok tani di Kec. Torue, yang menyebutkan bahwa :

“ kurang antusias, kelemahannya benih terlambat datang sehingga harus menunggu, baru untuk mendapatkan benih kami harus menyusun daftar pembelian subsidi dan harus menunggu proses kalau ada yang salah maka itu akan dikase perbaiki lagi kalau tidak maka kita tidak dilayani untuk membeli benih jadinya rumit mengurusnya.” (Wawancara, 30 Januari 2015).

Hal ini menggambarkan bahwa program pemberian subsidi benih kurang diminati para petani, karena seringnya keterlambatan benih dan pengurusan yang berbelit – belit membuat para petani menjadi tidak terlalu mengharapakan program subsidi benih ini.

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, sudah memiliki dukungan dari faktor politik yang sesuai dengan pendapat Bardach (dalam Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986: 156 – 167), dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan dari Made Holendia, yang merupakan anggota kelompok tani, mengungkapkan bahwa :

“ walaupun banyak masalah yang terjadi dilapangan, kami melihat para pengelola dan pelaksana program subsidi benih tetap komitmen untuk terus melaksanakan program pemberian subsidi benih ini “ (Wawancara, 30 Januari 2015)

Hal ini menunjukkan, bahwa Petani melihat para pengelola dan pelaksana Program Pemberian Subsidi Benih masih memiliki komitmen dalam melaksanakan dengan baik program ini, walaupun didapatkan berbagai masalah yang menghampiri pelaksanaannya. Mengenai dukungan organisasi, Made Holendia mengungkapkan :

“ Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kecamatan Torue ini susah baik, mereka memiliki tenaga – tenaga administrasi dan penyuluhan yang siap untuk datang ke petani dalam mensosialisasikan dan mengawasi program ini.” (Wawancara, 30 Januari 2015).

Hal ini menyimpulkan bahwa Pengelola program pemberian subsidi benih ini secara organisasi sudah memiliki perangkat – perangkat yang baik dalam upaya melaksanakan program dengan baik, yang keberadaannya untuk sosialisasi dan pengawasan program.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa : *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih dalam Peningkatan Produktivitas padi di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Masih Belum Efektif*, hal ini dinilai dari 4 aspek kajian dalam penelitian ini, yaitu : Program Pemberian Subsidi Benih di Kecamatan Torue dari aspek Kelayakan Teknis masih mengalami keterlambatan penyaluran dan ketidaksesuaian volume benih yang diberikan, dari aspek Faktor Ekonomi sudah mengalami peningkatan produktifitas, namun belum signifikan dirasakan oleh Petani, dari aspek Faktor Politik belum terlaksana secara optimal dari aspek sosialisasi dan pembinaan, serta pengawasan. dari aspek Operaabilitas Administrasi para pengelola program sudah memiliki komitmen dan kemampuan secara organisasi.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu 1) Saran Teoritis : Perlunya penelitian lanjutan tentang program pemberian Subsidi Benih yang jangkauannya lebih besar dari sekedar Kecamatan Torue dan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang indikator – indikator evaluasi kebijakan yang lebih banyak dalam

menghasilkan penelitian yang lebih luas. Sedangkan Saran Praktis : 1) Perlunya ketepatan jadwal pemberian subsidi benih yang sesuai dengan jadwal tanam petani, serta pemberian jenis benih yang sesuai dengan kebutuhan Petani di Kecamatan Torue. 2) Perlunya penambahan volume benih yang sesuai dengan kebutuhan Petani di Kecamatan Torue. 3) Perlunya meningkatkan sosialisasi kepada petani sehingga mengerti pentingnya program subsidi benih serta adanya pembinaan dan pengawasan dilapangan sehingga pelaksanaan subsidi tepat guna.. 4) Perlunya penambahan tenaga – tenaga administrasi dan penyuluh dalam rangka pengawasan pelaksanaan program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yaitu Prof. Dr. Sultan, M,Si dan Dr. Muh. Nawawi, M.Si atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bineka Cipta. Jakarta
Muhajir Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rakersarih, Yogyakarta.
Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Tarsito. Bandung.

Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
Patton, Carl V and Sawicki, David.S.1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. prentice hall, New York.
Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2014
Permentan No. 15/SR-120/3/2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Benih. Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia.
Silalahi. Uber. 2009. *Metode Penenlitian Sosial*, Rafika Aditama. Bandung.
Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
Soemardi. 1992. *Pengantar Administrasi Pemerintahan*. STKS. Bandung
Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 4340/Kpts/SR.120/6/2013, *Tentang Penetapan Subsidi Benih Untuk Komoditas Padi, Jagung Dan Kedelai Berupa Program Pemberian Bantuan Subsidi Benih Padi Kepada Petani*.
Winarno Budi. 2008, *Teori dan Proses Kebijakan Publik..* Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta